



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225035
Laman: www.imigrasi.go.id, surel: imigrasi.satu@gmail.com

Nomor : IMI-GR.01.01-0307 24 Oktober 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Implementasi Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan
Saat Kedatangan Sesuai Permenkumham Nomor 22
Tahun 2023

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia
di tempat

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, dan Entitas Tertentu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas visa kunjungan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, dan Entitas Tertentu (terlampir);
2. Sebagai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan:
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan (terlampir); dan
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (terlampir).

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023, ketentuan terhadap:
 - a. Permohonan dan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) merujuk pada Pasal 27 s.d. Pasal 31 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 sebagai berikut:
 - 1) Pemberian VKSK melalui mekanisme e-VOA dilakukan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) huruf a, Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 30, dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, dan
 - 2) Pemberian VKSK yang menggunakan vaucer dan stiker visa dilakukan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) huruf c, Pasal 27 ayat (7), Pasal 30, dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023;
 - b. Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 (terlampir);
 - c. Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan, dan Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Visa Kunjungan saat Kedatangan, merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (terlampir);
 - d. Persyaratan permohonan VKSK melalui mekanisme e-VOA atau permohonan VKSK yang menggunakan vaucer dan stiker visa merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023;
 - e. Dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan merujuk pada Pasal 14 ayat (4) Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.
4. Berdasarkan ketentuan dimaksud pada angka 3 huruf a angka 1), **lembar e-VOA diperlakukan sebagai bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan, sehingga apabila terdapat permasalahan yang tidak bersifat mendasar agar pemegang e-VOA sedapat mungkin difasilitasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian di TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
5. Implementasi TPI tertentu untuk masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan visa kunjungan saat kedatangan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, menunggu penetapan tarif PNBP yang pada saat ini masih sedang berproses.

6. Dengan terbitnya surat ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0244.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa dan Izin Tinggal Kunjungan, Visa dan Izin Tinggal Terbatas, serta Bebas Visa Kunjungan pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,



Silmy Karim

Tembusan:

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia;
11. Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk di Perwakilan RI.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.GR.01.07 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN UNTUK NEGARA, PEMERINTAH
WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bahaya dan gangguan keamanan negara dan kesehatan masyarakat atas pelaksanaan bebas visa kunjungan;
- b. bahwa pemberian bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara namun tidak terbatas pada pelanggaran keimigrasian, gangguan ketertiban umum, dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari World Health Organization;
- c. bahwa daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat dapat menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN UNTUK NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU.

KESATU : Menetapkan menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.GR.01.07 TAHUN 2023

Tanggal : 07 Juni 2023

**NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN
ENTITAS TERTENTU YANG DIHENTIKAN SEMENTARA DARI
BEBAS VISA KUNJUNGAN**

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Aljazair
4. Amerika Serikat
5. Andorra
6. Angola
7. Antigua dan Barbuda
8. Arab Saudi
9. Argentina
10. Armenia
11. Australia
12. Austria
13. Azerbaijan
14. Bahama
15. Bahrain
16. Bangladesh
17. Barbados
18. Belanda
19. Belarusia
20. Belgia
21. Belize
22. Benin
23. Bhutan
24. Bolivia
25. Bosnia dan Herzegovina
26. Botswana
27. Brazil
28. Bulgaria
29. Burkina Faso
30. Burundi
31. Ceko
32. Chad
33. Chili
34. Denmark
35. Dominika (Persemakmuran)
36. Ekuador
37. El Salvador
38. Estonia
39. Fiji
40. Finlandia
41. Gabon
42. Gambia
43. Georgia

44. Ghana
45. Grenada
46. Guetamala
47. Guyana
48. Haiti
49. Honduras
50. Hongaria
51. Hongkong (SAR)
52. India
53. Inggris
54. Irlandia
55. Islandia
56. Italia
57. Jamaika
58. Jepang
59. Jerman
60. Kanada
61. Kazakhstan
62. Kenya
63. Kepulauan Marshall
64. Kepulauan Solomon
65. Kiribati
66. Komoro
67. Korea Selatan
68. Kosta Rika
69. Kroasia
70. Kuba
71. Kuwait
72. Kyrgyzstan
73. Latvia
74. Lebanon
75. Lesotho
76. Liechtenstein
77. Lithuania
78. Luxembourg
79. Macao (SAR)
80. Madagaskar
81. Makedonia
82. Maladewa
83. Malawi
84. Mali
85. Malta
86. Maroko
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Meksiko
90. Mesir
91. Moldova
92. Monako
93. Mongolia
94. Mozambik
95. Namibia
96. Nauru
97. Nepal
98. Nikaragua
99. Norwegia

100. Oman
101. Palu
102. Palestina
103. Panama
104. Pantai Gading
105. Papua Nugini
106. Paraguay
107. Perancis
108. Peru
109. Polandia
110. Portugal
111. Puerto Rico
112. Qatar
113. Republik Dominika
114. Romania
115. Rusia
116. Rwanda
117. Saint Kitts dan Nevis
118. Saint Lucia
119. Saint Vincent dan Grenadines
120. Samoa
121. San Marino
122. Sao Tome dan Principe
123. Selandia Baru
124. Senegal
125. Serbia
126. Seychelles
127. Siprus
128. Slovakia
129. Slovenia
130. Spanyol
131. Sri Lanka
132. Suriname
133. Swaziland
134. Swedia
135. Swiss
136. Taiwan
137. Tajikistan
138. Tahta Suci Vatikan
139. Tanjung Verde
140. Tanzania
141. Togo
142. Tonga
143. Trinidad dan Tobago
144. Tunisia
145. Turki
146. Turkmenistan
147. Tuvalu
148. Uganda
149. Ukraina
150. Uni Emirate Arab
151. Uruguay
152. Tiongkok
153. Uzbekistan
154. Vanuatu
155. Venezuela

- 156. Yordania
- 157. Yunani
- 158. Zambia
- 159. Zimbabwe

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-04.GR.01.06 TAHUN 2023

TENTANG

**DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN
ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.
- KESATU : Menetapkan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-04.GR.01.06 TAHUN 2023

Tanggal : 01 September 2023

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

1. Afrika Selatan;
2. Albania;
3. Amerika Serikat;
4. Andorra
5. Arab Saudi;
6. Argentina;
7. Armenia;
8. Australia;
9. Austria;
10. Bahrain;
11. Belanda;
12. Belarus;
13. Belgia;
14. Brazil;
15. Brunei Darussalam;
16. Bosnia Herzegovina;
17. Bulgaria;
18. Ceko;
19. Chile;
20. Denmark;
21. Ekuador;
22. Estonia;
23. Filipina;
24. Finlandia;
25. Guatemala;
26. Hongkong;
27. Hungaria;
28. India;
29. Inggris;
30. Irlandia;
31. Italia;
32. Islandia;
33. Jepang;
34. Jerman;
35. Kamboja;
36. Kanada;
37. Kazakhstan;
38. Kenya;
39. Kolombia;
40. Korea Selatan;
41. Kroasia;
42. Kuwait;
43. Laos;
44. Latvia;
45. Liechtenstein;
46. Lithuania;
47. Luksemburg;
48. Makau;

49. Maladewa;
50. Malaysia;
51. Malta;
52. Maroko;
53. Meksiko;
54. Mesir;
55. Monako;
56. Mozambik;
57. Myanmar;
58. Norwegia;
59. Oman;
60. Palestina;
61. Panama;
62. Papua Nugini;
63. Perancis;
64. Peru;
65. Polandia;
66. Portugal;
67. Qatar;
68. Rumania;
69. Rusia;
70. Rwanda;
71. San Marino;
72. Selandia Baru;
73. Serbia;
74. Seychelles;
75. Singapura;
76. Siprus;
77. Slovakia;
78. Slovenia;
79. Spanyol;
80. Suriname;
81. Swedia;
82. Swiss;
83. Taiwan;
84. Tanzania;
85. Thailand;
86. Timor Leste;
87. Tiongkok;
88. Tunisia;
89. Turki;
90. Uni Emirat Arab;
91. Uzbekistan;
92. Ukraina;
93. Vatikan;
94. Venezuela;
95. Vietnam;
96. Yordania; dan
97. Yunani.

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H. LAOLY



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

KESATU : Menetapkan daftar tempat pemeriksaan imigrasi terdiri atas:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut;
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara;
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional;
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Tradisional;
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan Visa kunjungan saat kedatangan 7 (tujuh) hari;
6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan Visa kunjungan saat kedatangan 30 (tiga puluh) hari; dan
7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu untuk masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.

KEDUA : Menetapkan daftar tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

I. DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	MALAHAYATI	BANDA ACEH	ACEH	MHI
2.	SABANG	SABANG	ACEH	SBA
3.	KUALA LANGSA	LANGSA	ACEH	KUA
4.	LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	ACEH	LSW
5.	BELAWAN	BELAWAN	SUMATERA UTARA	BLW
6.	SIBOLGA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	SLG
7.	GUNUNG SITOLI	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	GNS
8.	TELUK NIBUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	NBG
9.	KUALA TANJUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	KTJ
10.	TELUK BAYUR	PADANG	SUMATERA BARAT	TBR
11.	DUMAI	DUMAI	RIAU	DUM
12.	BAGAN SIAPI-API	BAGAN SIAPI-API	RIAU	BII
13.	BANDAR SRI SETIA RAJA	BENGKALIS	RIAU	BFA
14.	TANJUNG MEDANG	BENGKALIS	RIAU	TJM
15.	SUNGAI PAKNING	BENGKALIS	RIAU	SGP
16.	TANJUNG HARAPAN	SELAT PANJANG	RIAU	TJH
17.	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	RIAU	TLN
18.	SUNGAI GUNTUNG	TEMBILAHAN	RIAU	SUQ
19.	KUALA ENOK	TEMBILAHAN	RIAU	ENO
20.	SIK SRI INDRAPURA	SIK	RIAU	SSI
21.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU	NNA
22.	KABIL	BATAM	KEPULAUAN RIAU	KAB
23.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SNB
24.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTC

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
25.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU	CTT
26.	BATU AMPAR	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BUR
27.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SKP
28.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	SBP
29.	SRI BAYINTAN	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	KIJ
30.	TANJUNG UBAN	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	TAN
31.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LAI
32.	BANDAR SERI UDANA LOBAM	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LBM
33.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	TJB
34.	BELAKANG PADANG	BELAKANG PADANG	KEPULAUAN RIAU	BPD
35.	SELAT LAMPA	RANAI	KEPULAUAN RIAU	STA
36.	TAREMPA	TAREMPA	KEPULAUAN RIAU	TER
37.	PANGKAL BALAM	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	PGX
38.	TANJUNG KALIAN	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	TGN
39.	TANJUNG GUDANG	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	BLN
40.	TANJUNG PANDAN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJA
41.	JAMBI	JAMBI	JAMBI	DJB
42.	KUALA TUNGKAL	KUALA TUNGKAL	JAMBI	KTK
43.	MUARA SABAK	KUALA TUNGKAL	JAMBI	MSB
44.	PULAU BAAI	BENGKULU	BENGKULU	BAI
45.	BOOM BARU	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLO
46.	PANJANG	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	PNJ
47.	CIWANDAN	CILEGON	BANTEN	CIW
48.	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA	TPP
49.	SUNDA KELAPA	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SKE
50.	MARINA ANCOL	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	ACL
51.	CIREBON	CIREBON	JAWA BARAT	CRB
52.	PATIMBAN	BANDUNG	JAWA BARAT	PMB
53.	TANJUNG EMAS	SEMARANG	JAWA TENGAH	TES
54.	TANJUNG INTAN	CILACAP	JAWA TENGAH	TNN

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
55.	TANJUNG PERAK	TANJUNG PERAK	JAWA TIMUR	TJP
56.	PASURUAN	MALANG	JAWA TIMUR	PAZ
57.	PROBOLINGGO	MALANG	JAWA TIMUR	PRO
58.	PANARUKAN	JEMBER	JAWA TIMUR	PRN
59.	TANJUNG WANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	TWA
60.	DWI KORA	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PTK
61.	SINTETE	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	SNE
62.	SAMPIT	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	SMQ
63.	KUMAI	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	KUM
64.	TRI SAKTI	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TRI
65.	KOTA BARU	BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	KBU
66.	SEMAYANG	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPP
67.	SAMARINDA	SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	SRI
68.	MALUNDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	MLD
69.	SOEKARNO-HATTA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	SOT
70.	NUSANTARA PARE PARE	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	PAP
71.	GARONGKONG	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	GRG
72.	KENDARI	KENDARI	SULAWESI TENGGARA	KDI
73.	PANTOLOAN	PALU	SULAWESI TENGAH	PTL
74.	MANADO	MANADO	SULAWESI UTARA	MDO
75.	NUSANTARA	TAHUNA	SULAWESI UTARA	THN
76.	SAMUDERA	BITUNG	SULAWESI UTARA	BTG
77.	ANGGREK	GORONTALO	GORONTALO	AGK
78.	BENOA	DENPASAR	BALI	BOA
79.	CELUKAN BAWANG	SINGARAJA	BALI	CEB
80.	PADANG BAI	SINGARAJA	BALI	PBI
81.	LEMBAR	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LMR
82.	BENETE	SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	BEN
83.	TENAU	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	TEN
84.	LAUREN SAY	MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR	LSM

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
85.	LABUAN BAJO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
86.	ACHMAD YANI	TERNATE	MALUKU UTARA	TNT
87.	YOS SUDARSO	AMBON	MALUKU	AMB
88.	TUAL	TUAL	MALUKU	TUA
89.	SAUMLAKI	TUAL	MALUKU	SXK
90.	JAYAPURA	JAYAPURA	PAPUA	DJY
91.	BIAK	BIAK	PAPUA	BIA
92.	MERAUKE	MERAUKE	PAPUA	MKE
93.	AMAMAPARE	MIMIKA	PAPUA	AMA
94.	SORONG	SORONG	PAPUA	SOQ
95.	TABONEO	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TBN

II. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	SOEKARNO-HATTA	SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA	CGK
2.	KERTAJATI	CIREBON	JAWA BARAT	KJT
3.	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YIA
4.	JUANDA	SURABAYA	JAWA TIMUR	SUB
5.	I GUSTI NGURAH RAI	NGURAH RAI	BALI	DPS
6.	ZAINUDDIN ABDUL MAJID	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LOP
7.	SULTAN ISKANDAR MUDA	BANDA ACEH	D.I ACEH	BTJ
8.	KUALANAMU	MEDAN	SUMATERA UTARA	KNO
9.	MINANGKABAU	PADANG	SUMATERA BARAT	PDG
10.	SULTAN SYARIF KASIM II	PEKANBARU	RIAU	PKU
11.	HANG NADIM	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTH
12.	S.A.M.S SEPINGGAN	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPN
13.	SULTAN HASANUDDIN	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	UPG
14.	SAM RATULANGI	MANADO	SULAWESI UTARA	MDC
15.	SENTANI	JAYAPURA	PAPUA	DJJ
16.	KOMODO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
17.	MAIMUN SALEH	SABANG	D.I ACEH	SBG
18.	SOEWONDO	POLONIA	SUMATERA UTARA	MES
19.	BINAKA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	BNK
20.	SILANGIT / SISINGAMARAJA XII	PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	DTB
21.	RAJA HAJI FISABILILLAH	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	TNJ
22.	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLM
23.	H.A.S. HANANDJOEDDIN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJQ
24.	RADIN INTEN II	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	TKG
25.	HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	HLP
26.	HUSEIN SASTRANEGARA	BANDUNG	JAWA BARAT	BDO
27.	AHMAD YANI	SEMARANG	JAWA TENGAH	SRG

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
28.	ADI SOEMARMO	SURAKARTA	JAWA TENGAH	SOC
29.	ADI SUCIPTO	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	JOG
30.	BANYUWANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	BWX
31.	SUPADIO	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PNK
32.	JUWATA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	TRK
33.	SYAMSUDIN NOOR	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	BDJ
34.	EL TARI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	KOE
35.	PATTIMURA	AMBON	MALUKU	AMQ
36.	FRANS KAISIEPO	BIAK	PAPUA	BIK
37.	MOPAH	MERAUKE	PAPUA	MKQ
38.	MOZES KILANGIN	MIMIKA	PAPUA	TIM

III. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS INTERNASIONAL

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
1.	ARUK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	ARUK	DARAT
2.	ENTIKONG	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	ETKG	DARAT
3.	NANGA BADAU	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	NGBD	DARAT
4.	TUNON TAKA	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	DBJ	PERAIRAN
5.	MOTA'AIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTIN	DARAT
6.	MOTAMASIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTSN	DARAT
7.	NAPAN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	NPAN	DARAT
8.	WINI	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	WINI	DARAT
9.	MIANGAS	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MGS	PERAIRAN
10.	MARORE	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MRE	PERAIRAN
11.	SKOUW	JAYAPURA	PAPUA	SKOW	DARAT
12.	SERASAN	RANAI	KEPULAUAN RIAU	SRSN	PERAIRAN
13.	JAGOI BABANG	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	JGBB	DARAT
14.	SOTA	MERAUKE	PAPUA	SOTA	DARAT
15.	SEI NYAMUK	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	NYMK	PERAIRAN
16.	YETETKUN	MERAUKE	PAPUA	YTKN	DARAT

IV. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS TRADISIONAL

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
1.	MERAKAI PANJANG	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	MRPJ	DARAT
2.	LANGAU	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	LNGU	DARAT
3.	SEI KELIK	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	SKLK	DARAT
4.	SEMAREH	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	SMRH	DARAT
5.	NANGA BAYAN	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	NGBY	DARAT
6.	SIDING	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	SDNG	DARAT
7.	SAPARAN	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	SPRN	DARAT
8.	BANTAN	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	BNTN	DARAT
9.	SEGUMON	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	SGMN	DARAT
10.	PALOH/LIKU	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	PALH	DARAT
11.	TEMAJUK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	TMJK	DARAT
12.	LONG NAWANG	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	LGNW	DARAT
13.	LONG MIDANG	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	LGMD	DARAT
14.	LUMBIS	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	LMBS	DARAT
15.	SEI MANGGARIS	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	MGRS	DARAT
16.	LIEM HIE DJUNG	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	LHDJ	PERAIRAN
17.	LABANG	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	LBNG	PERAIRAN
18.	YURRUP	JAYAPURA	PAPUA	YRRP	DARAT
19.	BATOM	JAYAPURA	PAPUA	BATM	DARAT
20.	OKYOP	JAYAPURA	PAPUA	OKYP	DARAT
21.	IWUR	JAYAPURA	PAPUA	IWUR	DARAT
22.	UBRUP	JAYAPURA	PAPUA	UBRP	DARAT
23.	WEMBI	JAYAPURA	PAPUA	WMBI	DARAT
24.	SENGGI	JAYAPURA	PAPUA	SNGI	DARAT
25.	KWIROK	JAYAPURA	PAPUA	KWRK	DARAT
26.	WARIS	JAYAPURA	PAPUA	WRIS	DARAT
27.	YETTI	JAYAPURA	PAPUA	YTTI	DARAT

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
28.	HAMADI	JAYAPURA	PAPUA	HMDI	PERAIRAN
29.	ERAMBU	MERAUKE	PAPUA	ERMB	DARAT
30.	BUPUL	MERAUKE	PAPUA	BPUL	DARAT
31.	MINDIPTANA	MERAUKE	PAPUA	MPTN	DARAT
32.	WAROPKO	MERAUKE	PAPUA	WRPK	DARAT
33.	KONDO	MERAUKE	PAPUA	KNDO	DARAT
34.	OEPOLI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	OPLI	DARAT
35.	HAUMENIANA	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	HMNA	DARAT
36.	BUILALO	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	BLLO	DARAT
37.	LAKTUTUS	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	LKTS	DARAT
38.	LAKMARES	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	LKRS	DARAT
39.	TURISKAIN / HAEKESAK	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	TRHK	DARAT
40.	SKOFRO	JAYAPURA	PAPUA	SKOP	DARAT

V. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK MASUK DAN/ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU DENGAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN 7 (TUJUH) HARI

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU	NNA
2.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SNB
3.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTC
4.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU	CTT
5.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SKP
6.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	SBP
7.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LAI
8.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	TJB

VI. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK MASUK DAN/ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU DENGAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN 30 (TIGA PULUH) HARI

1. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	SOEKARNO-HATTA	SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA	CGK
2.	KERTAJATI	CIREBON	JAWA BARAT	KJT
3.	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YIA
4.	JUANDA	SURABAYA	JAWA TIMUR	SUB
5.	I GUSTI NGURAH RAI	NGURAH RAI	BALI	DPS
6.	ZAINUDDIN ABDUL MAJID	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LOP
7.	SULTAN ISKANDAR MUDA	BANDA ACEH	D.I ACEH	BTJ
8.	KUALANAMU	MEDAN	SUMATERA UTARA	KNO
9.	MINANGKABAU	PADANG	SUMATERA BARAT	PDG
10	SULTAN SYARIF KASIM II	PEKANBARU	RIAU	PKU
11	HANG NADIM	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTH
12	S.A.M.S SEPINGGAN	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPN
13	SULTAN HASANUDDIN	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	UPG
14	SAM RATULANGI	MANADO	SULAWESI UTARA	MDC
15	SENTANI	JAYAPURA	PAPUA	DJJ
16	KOMODO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
17	MAIMUN SALEH	SABANG	D.I ACEH	SBG
18	SOEWONDO	POLONIA	SUMATERA UTARA	MES
19	BINAKA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	BNK
20	SILANGIT / SISINGAMARAJA XII	PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	DTB
21	RAJA HAJI FISABILILLAH	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	TNJ
22	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLM
23	H.A.S. HANANDJOEDDIN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJQ
24	RADIN INTEN II	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	TKG

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
25	HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	HLP
26	HUSEIN SASTRANEGARA	BANDUNG	JAWA BARAT	BDO
27	AHMAD YANI	SEMARANG	JAWA TENGAH	SRG
28	ADI SOEMARMO	SURAKARTA	JAWA TENGAH	SOC
29	ADI SUCIPTO	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	JOG
30	BANYUWANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	BWX
31	SUPADIO	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PNK
32	JUWATA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	TRK
33	SYAMSUDIN NOOR	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	BDJ
34	EL TARI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	KOE
35	PATTIMURA	AMBON	MALUKU	AMQ
36	FRANS KAISIEPO	BIAK	PAPUA	BIK
37	MOPAH	MERAUKE	PAPUA	MKQ
38	MOZES KILANGIN	MIMIKA	PAPUA	TIM

2. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	MALAHAYATI	BANDA ACEH	ACEH	MHI
2.	SABANG	SABANG	ACEH	SBA
3.	KUALA LANGSA	LANGSA	ACEH	KUA
4.	LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	ACEH	LSW
5.	BELAWAN	BELAWAN	SUMATERA UTARA	BLW
6.	SIBOLGA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	SLG
7.	GUNUNG SITOLI	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	GNS
8.	TELUK NIBUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	NBG
9.	KUALA TANJUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	KTJ
10.	TELUK BAYUR	PADANG	SUMATERA BARAT	TBR
11.	DUMAI	DUMAI	RIAU	DUM
12.	BAGAN SIAPI-API	BAGAN SIAPI-API	RIAU	BII

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
13.	BANDAR SRI SETIA RAJA	BENGKALIS	RIAU	BFA
14.	TANJUNG MEDANG	BENGKALIS	RIAU	TJM
15.	SUNGAI PAKNING	BENGKALIS	RIAU	SGP
16.	TANJUNG HARAPAN	SELAT PANJANG	RIAU	TJH
17.	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	RIAU	TLN
18.	SUNGAI GUNTUNG	TEMBILAHAN	RIAU	SUQ
19.	KUALA ENOK	TEMBILAHAN	RIAU	ENO
20.	SIAK SRI INDRAPURA	SIAK	RIAU	SSI
21.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU	NNA
22.	KABIL	BATAM	KEPULAUAN RIAU	KAB
23.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SNB
24.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTC
25.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU	CTT
26.	BATU AMPAR	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BUR
27.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SKP
28.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	SBP
29.	SRI BAYINTAN	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	KIJ
30.	TANJUNG UBAN	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	TAN
31.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LAI
32.	BANDAR SERI UDANA LOBAM	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LBM
33.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	TJB
34.	BELAKANG PADANG	BELAKANG PADANG	KEPULAUAN RIAU	BPD
35.	SELAT LAMPA	RANAI	KEPULAUAN RIAU	STA
36.	TAREMPA	TAREMPA	KEPULAUAN RIAU	TER
37.	PANGKAL BALAM	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	PGX
38.	TANJUNG KALIAN	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	TGN
39.	TANJUNG GUDANG	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	BLN
40.	TANJUNG PANDAN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJA
41.	JAMBI	JAMBI	JAMBI	DJB
42.	KUALA TUNGKAL	KUALA TUNGKAL	JAMBI	KTK
43.	MUARA SABAK	KUALA TUNGKAL	JAMBI	MSB

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
44.	PULAU BAAI	BENGKULU	BENGKULU	BAI
45.	BOOM BARU	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLO
46.	PANJANG	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	PNJ
47.	CIWANDAN	CILEGON	BANTEN	CIW
48.	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA	TPP
49.	SUNDA KELAPA	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SKE
50.	MARINA ANCOL	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	ACL
51.	CIREBON	CIREBON	JAWA BARAT	CRB
52.	PATIMBAN	BANDUNG	JAWA BARAT	PMB
53.	TANJUNG EMAS	SEMARANG	JAWA TENGAH	TES
54.	TANJUNG INTAN	CILACAP	JAWA TENGAH	TNN
55.	TANJUNG PERAK	TANJUNG PERAK	JAWA TIMUR	TJP
56.	PASURUAN	MALANG	JAWA TIMUR	PAZ
57.	PROBOLINGGO	MALANG	JAWA TIMUR	PRO
58.	PANARUKAN	JEMBER	JAWA TIMUR	PRN
59.	TANJUNG WANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	TWA
60.	DWI KORA	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PTK
61.	SINTETE	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	SNE
62.	SAMPIT	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	SMQ
63.	KUMAI	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	KUM
64.	TRI SAKTI	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TRI
65.	KOTA BARU	BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	KBU
66.	SEMAYANG	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPP
67.	SAMARINDA	SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	SRI
68.	MALUNDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	MLD
69.	SOEKARNO-HATTA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	SOT
70.	NUSANTARA PARE PARE	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	PAP
71.	GARONGKONG	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	GRG
72.	KENDARI	KENDARI	SULAWESI TENGGARA	KDI
73.	PANTOLOAN	PALU	SULAWESI TENGAH	PTL

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
74.	MANADO	MANADO	SULAWESI UTARA	MDO
75.	NUSANTARA	TAHUNA	SULAWESI UTARA	THN
76.	SAMUDERA	BITUNG	SULAWESI UTARA	BTG
77.	ANGGREK	GORONTALO	GORONTALO	AGK
78.	BENOA	DENPASAR	BALI	BOA
79.	CELUKAN BAWANG	SINGARAJA	BALI	CEB
80.	PADANG BAI	SINGARAJA	BALI	PBI
81.	LEMBAR	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LMR
82.	BENETE	SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	BEN
83.	TENAU	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	TEN
84.	LAUREN SAY	MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR	LSM
85.	LABUAN BAJO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
86.	ACHMAD YANI	TERNATE	MALUKU UTARA	TNT
87.	YOS SUDARSO	AMBON	MALUKU	AMB
88.	TUAL	TUAL	MALUKU	TUA
89.	SAUMLAKI	TUAL	MALUKU	SXK
90.	JAYAPURA	JAYAPURA	PAPUA	DJY
91.	BIAK	BIAK	PAPUA	BIA
92.	MERAUKE	MERAUKE	PAPUA	MKE
93.	AMAMAPARE	MIMIKA	PAPUA	AMA
94.	SORONG	SORONG	PAPUA	SOQ
95.	TABONEO	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TBN

3. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
1.	ARUK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	ARUK	DARAT
2.	ENTIKONG	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	ETKG	DARAT
3.	NANGA BADAU	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	NGBD	DARAT

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
4.	TUNON TAKA	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	DBJ	PERAIRAN
5.	MOTA'AIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTIN	DARAT
6.	MOTAMASIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTSN	DARAT
7.	NAPAN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	NPAN	DARAT
8.	WINI	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	WINI	DARAT
9.	MIANGAS	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MGS	PERAIRAN
10.	MARORE	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MRE	PERAIRAN
11.	SKOUW	JAYAPURA	PAPUA	SKOW	DARAT
12.	SERASAN	RANAI	KEPULAUAN RIAU	SRSN	PERAIRAN
13.	JAGOI BABANG	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	JGBB	DARAT
14.	SOTA	MERAUKE	PAPUA	SOTA	DARAT
15.	SEI NYAMUK	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	NYMK	PERAIRAN
16.	YETETKUN	MERAUKE	PAPUA	YTKN	DARAT

VII. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK MASUK DAN/ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING WARGA NEGARA DARI NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI VISA

1. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	SOEKARNO-HATTA	SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA	CGK
2.	KERTAJATI	CIREBON	JAWA BARAT	KJT
3.	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YIA
4.	JUANDA	SURABAYA	JAWA TIMUR	SUB
5.	I GUSTI NGURAH RAI	NGURAH RAI	BALI	DPS
6.	ZAINUDDIN ABDUL MAJID	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LOP
7.	SULTAN ISKANDAR MUDA	BANDA ACEH	D.I ACEH	BTJ
8.	KUALANAMU	MEDAN	SUMATERA UTARA	KNO
9.	MINANGKABAU	PADANG	SUMATERA BARAT	PDG
10	SULTAN SYARIF KASIM II	PEKANBARU	RIAU	PKU
11	HANG NADIM	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTH
12	S.A.M.S SEPINGGAN	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPN
13	SULTAN HASANUDDIN	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	UPG
14	SAM RATULANGI	MANADO	SULAWESI UTARA	MDC
15	SENTANI	JAYAPURA	PAPUA	DJJ
16	KOMODO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
17	MAIMUN SALEH	SABANG	D.I ACEH	SBG
18	SOEWONDO	POLONIA	SUMATERA UTARA	MES
19	BINAKA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	BNK
20	SILANGIT / SISINGAMARAJA XII	PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	DTB
21	RAJA HAJI FISABILILLAH	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	TNJ
22	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLM
23	H.A.S. HANANDJOEDDIN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJQ
24	RADIN INTEN II	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	TKG
25	HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	HLP

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
26	HUSEIN SASTRANEGARA	BANDUNG	JAWA BARAT	BDO
27	AHMAD YANI	SEMARANG	JAWA TENGAH	SRG
28	ADI SOEMARMO	SURAKARTA	JAWA TENGAH	SOC
29	ADI SUCIPTO	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	JOG
30	BANYUWANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	BWX
31	SUPADIO	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PNK
32	JUWATA	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	TRK
33	SYAMSUDIN NOOR	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	BDJ
34	EL TARI	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	KOE
35	PATTIMURA	AMBON	MALUKU	AMQ
36	FRANS KAISIEPO	BIAK	PAPUA	BIK
37	MOPAH	MERAUKE	PAPUA	MKQ
38	MOZES KILANGIN	MIMIKA	PAPUA	TIM

2. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
1.	MALAHAYATI	BANDA ACEH	ACEH	MHI
2.	SABANG	SABANG	ACEH	SBA
3.	KUALA LANGSA	LANGSA	ACEH	KUA
4.	LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	ACEH	LSW
5.	BELAWAN	BELAWAN	SUMATERA UTARA	BLW
6.	SIBOLGA	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	SLG
7.	GUNUNG SITOLI	SIBOLGA	SUMATERA UTARA	GNS
8.	TELUK NIBUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	NBG
9.	KUALA TANJUNG	TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	KTJ
10.	TELUK BAYUR	PADANG	SUMATERA BARAT	TBR
11.	DUMAI	DUMAI	RIAU	DUM
12.	BAGAN SIPI-API	BAGAN SIPI-API	RIAU	BII
13.	BANDAR SRI SETIA RAJA	BENGKALIS	RIAU	BFA

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
14	TANJUNG MEDANG	BENGKALIS	RIAU	TJM
15	SUNGAI PAKNING	BENGKALIS	RIAU	SGP
16.	TANJUNG HARAPAN	SELAT PANJANG	RIAU	TJH
17.	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN	RIAU	TLN
18.	SUNGAI GUNTUNG	TEMBILAHAN	RIAU	SUQ
19.	KUALA ENOK	TEMBILAHAN	RIAU	ENO
20.	SIK SRI INDRAPURA	SIK	RIAU	SSI
21.	NONGSA TERMINAL BAHARI	BATAM	KEPULAUAN RIAU	NNA
22.	KABIL	BATAM	KEPULAUAN RIAU	KAB
23.	MARINA TELUK SENIMBA	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SNB
24.	BATAM CENTRE	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BTC
25.	CITRA TRI TUNAS	BATAM	KEPULAUAN RIAU	CTT
26.	BATU AMPAR	BATAM	KEPULAUAN RIAU	BUR
27.	SEKUPANG	BATAM	KEPULAUAN RIAU	SKP
28.	SRI BINTAN PURA	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	SBP
29.	SRI BAYINTAN	TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	KIJ
30.	TANJUNG UBAN	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	TAN
31.	BANDAR BENTAN TELANI LAGOI	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LAI
32.	BANDAR SERI UDANA LOBAM	TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	LBM
33.	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	TJB
34.	BELAKANG PADANG	BELAKANG PADANG	KEPULAUAN RIAU	BPD
35.	SELAT LAMPA	RANAI	KEPULAUAN RIAU	STA
36.	TAREMPA	TAREMPA	KEPULAUAN RIAU	TER
37.	PANGKAL BALAM	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	PGX
38.	TANJUNG KALIAN	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	TGN
39.	TANJUNG GUDANG	PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	BLN
40.	TANJUNG PANDAN	TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	TJA
41.	JAMBI	JAMBI	JAMBI	DJB
42.	KUALA TUNGKAL	KUALA TUNGKAL	JAMBI	KTK
43.	MUARA SABAK	KUALA TUNGKAL	JAMBI	MSB
44.	PULAU BAAI	BENGKULU	BENGKULU	BAI

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
45.	BOOM BARU	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PLO
46.	PANJANG	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	PNJ
47.	CIWANDAN	CILEGON	BANTEN	CIW
48.	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA	TPP
49.	SUNDA KELAPA	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SKE
50.	MARINA ANCOL	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	ACL
51.	CIREBON	CIREBON	JAWA BARAT	CRB
52.	PATIMBAN	BANDUNG	JAWA BARAT	PMB
53.	TANJUNG EMAS	SEMARANG	JAWA TENGAH	TES
54.	TANJUNG INTAN	CILACAP	JAWA TENGAH	TNN
55.	TANJUNG PERAK	TANJUNG PERAK	JAWA TIMUR	TJP
56.	PASURUAN	MALANG	JAWA TIMUR	PAZ
57.	PROBOLINGGO	MALANG	JAWA TIMUR	PRO
58.	PANARUKAN	JEMBER	JAWA TIMUR	PRN
59.	TANJUNG WANGI	JEMBER	JAWA TIMUR	TWA
60.	DWI KORA	PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PTK
61.	SINTETE	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	SNE
62.	SAMPIT	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	SMQ
63.	KUMAI	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	KUM
64.	TRI SAKTI	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TRI
65.	KOTA BARU	BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	KBU
66.	SEMAYANG	BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	BPP
67.	SAMARINDA	SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	SRI
68.	MALUNDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	MLD
69.	SOEKARNO-HATTA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	SOT
70.	NUSANTARA PARE PARE	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	PAP
71.	GARONGKONG	PARE-PARE	SULAWESI SELATAN	GRG
72.	KENDARI	KENDARI	SULAWESI TENGGARA	KDI
73.	PANTOLOAN	PALU	SULAWESI TENGAH	PTL
74.	MANADO	MANADO	SULAWESI UTARA	MDO

NO	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI
75.	NUSANTARA	TAHUNA	SULAWESI UTARA	THN
76.	SAMUDERA	BITUNG	SULAWESI UTARA	BTG
77.	ANGGREK	GORONTALO	GORONTALO	AGK
78.	BENOA	DENPASAR	BALI	BOA
79.	CELUKAN BAWANG	SINGARAJA	BALI	CEB
80.	PADANG BAI	SINGARAJA	BALI	PBI
81.	LEMBAR	MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	LMR
82.	BENETE	SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	BEN
83.	TENAU	KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	TEN
84.	LAUREN SAY	MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR	LSM
85.	LABUAN BAJO	LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	LBJ
86.	ACHMAD YANI	TERNATE	MALUKU UTARA	TNT
87.	YOS SUDARSO	AMBON	MALUKU	AMB
88.	TUAL	TUAL	MALUKU	TUA
89.	SAUMLAKI	TUAL	MALUKU	SXK
90.	JAYAPURA	JAYAPURA	PAPUA	DJY
91.	BIAK	BIAK	PAPUA	BIA
92.	MERAUKE	MERAUKE	PAPUA	MKE
93.	AMAMAPARE	MIMIKA	PAPUA	AMA
94.	SORONG	SORONG	PAPUA	SOQ
95.	TABONEO	BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TBN

3. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI POS LINTAS BATAS

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
1.	ARUK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	ARUK	DARAT
2.	ENTIKONG	ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	ETKG	DARAT
3.	NANGA BADAU	PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	NGBD	DARAT
4.	TUNON TAKA	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	DBJ	PERAIRAN
5.	MOTA'AIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTIN	DARAT

NO	POS LINTAS BATAS	KANTOR IMIGRASI	KANTOR WILAYAH	KODE TPI	KETERANGAN
6.	MOTAMASIN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	MTSN	DARAT
7.	NAPAN	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	NPAN	DARAT
8.	WINI	ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	WINI	DARAT
9.	MIANGAS	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MGS	PERAIRAN
10.	MARORE	TAHUNA	SULAWESI UTARA	MRE	PERAIRAN
11.	SKOUW	JAYAPURA	PAPUA	SKOW	DARAT
12.	SERASAN	RANAI	KEPULAUAN RIAU	SRSN	PERAIRAN
13.	JAGOI BABANG	SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	JGBB	DARAT
14.	SOTA	MERAUKE	PAPUA	SOTA	DARAT
15.	SEI NYAMUK	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	NYMK	PERAIRAN
16.	YETETKUN	MERAUKE	PAPUA	YTKN	DARAT

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY